

MENANTANG STEREOTIP GENDER: PEMIMPIN PEREMPUAN DALAM RANAH POLITIK

Leoni Nindyasari¹
Universitas Indonesia¹
leoni.nindyasari@ui.ac.id¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana stereotip gender dan konstruksi budaya memengaruhi penerimaan serta legitimasi pemimpin perempuan dalam politik Indonesia, serta mengidentifikasi strategi yang digunakan untuk menantang stereotip tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus terhadap pemimpin perempuan Indonesia, yaitu Khofifah Indar Parawansa dan Sherly Tjoanda. Hasil analisis menunjukkan bahwa kedua tokoh berhasil menegosiasikan norma gender dan tantangan kultural melalui strategi komunikatif, simbolik, dan performatif untuk memperkuat legitimasi kepemimpinan mereka. Khofifah memadukan identitas religius dan gaya kepemimpinan *agentic* untuk menepis resistensi berbasis agama, sedangkan Sherly menembus batas stereotip sebagai minoritas gender, agama, dan etnis melalui pendekatan berbasis kedekatan sosial dan konsistensi kinerja. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi representasi dan komunikasi yang kontekstual berperan penting dalam mereduksi hambatan berbasis stereotip gender. Kehadiran pemimpin perempuan yang mampu menavigasi tantangan kultural dan struktural secara efektif berpotensi mendorong transformasi menuju kepemimpinan politik yang lebih inklusif dan substantif di Indonesia.

Kata Kunci: Budaya Patriarki, Pemimpin Perempuan, Representasi Politik, Stereotip Gender, Teori Kesesuaian Peran.

ABSTRACT

This study aims to analyze how gender stereotypes and cultural constructs influence the acceptance and legitimacy of female leaders in Indonesian politics, as well as to identify strategies used to challenge these stereotypes. The research method used is a qualitative approach with a case study design on two Indonesian female leaders, namely Khofifah Indar Parawansa and Sherly Tjoanda. The results of the analysis show that both figures successfully negotiated gender norms and cultural challenges through communicative, symbolic, and performative strategies to strengthen the legitimacy of their leadership. Khofifah combined her religious identity and agentic leadership style to dispel religious-based resistance, while Sherly broke through the boundaries of stereotypes as a gender, religious, and ethnic minority through an approach based on social closeness and consistent performance. This study concludes that contextual representation and communication strategies play an important role in reducing gender-based stereotypical barriers. The presence of female leaders who are able to effectively navigate cultural and structural challenges has the potential to encourage a transformation towards more inclusive and substantive political leadership in Indonesia.

Keywords: *Female Leadership, Gender Stereotypes, Patriarchal Culture, Political Representation, Role Congruity Theory.*

PENDAHULUAN

Politik selama ini kerap diidentikkan sebagai wilayah maskulin yang tabu dimasuki perempuan. Dalam dunia politik, perempuan acap kali diposisikan sebagai kelompok marjinal dengan hak-hak politik yang semu sehingga hampir semua kebijakan diputuskan dari sudut pandang laki-laki dengan minim pertimbangan perspektif gender (Mandasari, 2023). Namun, seiring waktu, politik kini tidak lagi menjadi ranah eksklusif bagi laki-laki. Meskipun kesetaraan penuh belum tercapai, perempuan mulai mendapatkan tempat dan posisi strategis di bidang politik.

Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan sangat penting untuk mewujudkan demokrasi yang inklusif; kehadiran perempuan di parlemen terbukti dapat menghasilkan kebijakan yang lebih ramah dan sensitif gender, sementara ketiadaannya cenderung membuat kepentingan laki-laki menjadi pusat kebijakan. Faktanya, komposisi anggota DPR RI periode 2024–2029 yang berjenis kelamin perempuan mencapai 21,9% (127 dari 580 kursi). Ini merupakan persentase tertinggi sepanjang sejarah legislatif Indonesia, meskipun masih di bawah target 30% keterwakilan yang dicanangkan (Uzma, 2024).

Peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik tidak terjadi seketika, melainkan melalui perjuangan panjang yang melahirkan berbagai kebijakan afirmatif untuk mendorong partisipasi politik perempuan (Faisal et al., 2024). Akan tetapi, meningkatnya jumlah perempuan di parlemen setiap

pemilu nyatanya belum berhasil menghapus stereotip terhadap perempuan yang terjun di kancah politik, khususnya pada level kepemimpinan daerah. Dalam kontestasi pemilihan kepala daerah, alih-alih beradu gagasan, sebagian kontestan laki-laki justru tak segan melancarkan serangan bernada seksis kepada lawan perempuan. Beberapa waktu lalu, muncul spanduk bernada merendahkan perempuan, seperti: *“Wong wedok iku nggone nang sumur, dapur lan kasur, gak dadi bupati!”* (yang berarti *perempuan tempatnya di sumur, dapur, dan kasur, tidak pantas menjadi bupati*) dan *“Milih imam kok wedok... Imam kudu lanang!”* (memilih pemimpin kok perempuan? Pemimpin harus laki-laki) yang bertebaran di sejumlah daerah (Komnas Perempuan, 2024). Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa bias dan stigma gender masih digunakan sebagai senjata politik untuk mendiskreditkan kandidat perempuan.

Anzia & Bernhard (2022) menemukan bahwa stereotip gender masih memengaruhi preferensi politik terutama dalam situasi dengan informasi rendah. Voter dan elite partai cenderung menggunakan stereotip sebagai *heuristic* ketika kurang mengenal kandidat, yang merugikan kandidat perempuan. Mereka menekankan bahwa kehadiran lebih banyak perempuan dalam jabatan eksekutif dapat menjadi kunci mematahkan bias ini dengan memperkenalkan *role model* perempuan yang berhasil. Sementara itu, Givon et al., (2023) menyoroti salah satu stereotip tertua bahwa perempuan

dianggap lebih emosional dan kurang rasional dibanding laki-laki. Stereotip ini berdampak pada penilaian yang tidak adil: ekspresi emosi pada perempuan pemimpin cenderung ditafsirkan negatif seolah mempengaruhi kapasitasnya mengambil keputusan, sedangkan emosi pada laki-laki pemimpin diabaikan pengaruhnya. Akibatnya, perempuan dipersepsikan kurang objektif, mudah tersinggung terhadap kritik, dan kurang mampu memimpin secara tegas. Prasangka semacam ini jelas melemahkan persepsi kompetensi pemimpin perempuan di mata publik. Penelitian lain mengungkap ekspektasi sosial yang kontradiktif terhadap perempuan dalam politik. Mendoza & Dimaria (2019) menemukan bahwa *ambisi kekuasaan* pada perempuan dianggap melanggar norma gender tradisional sehingga politisi perempuan dinilai kurang layak didukung dibanding laki-laki dengan kualifikasi setara. Temuan dari literatur di atas menunjukkan konsistensi bahwa di berbagai konteks, pemimpin perempuan masih dihadapkan pada stereotip bias yang menghambat mereka, baik secara psikologis maupun struktural.

Tahun politik 2024 isu kepemimpinan perempuan dalam politik Indonesia menjadi semakin relevan untuk dikaji secara kritis. Capaian keterwakilan perempuan yang tertinggi sepanjang sejarah di DPR RI periode 2024-2029 serta meningkatnya partisipasi perempuan dalam Pilkada menandai titik balik penting dalam demokrasi Indonesia (Uzma, 2024). Di satu sisi, perkembangan ini membawa harapan akan lahirnya kebijakan publik yang lebih sensitif gender dan

berperspektif inklusif. Sebagaimana diungkapkan Ketua DPR Puan Maharani, kehadiran lebih banyak perempuan di parlemen diharapkan dapat “mewarnai semua proses” legislasi dengan membawa isu-isu yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan dan masyarakat luas.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa stereotip gender masih menjadi faktor kunci yang memengaruhi penilaian terhadap perempuan dalam posisi kepemimpinan. Heilman et al. (2024) menjelaskan bahwa stereotip gender bekerja melalui dua mekanisme utama, yakni stereotip deskriptif yang membangun persepsi ketidakcocokan perempuan dengan peran kepemimpinan dan stereotip yang menghukum perempuan ketika menampilkan perilaku kepemimpinan yang menyimpang dari norma feminin sehingga menghasilkan bias evaluatif yang persisten meskipun perempuan menunjukkan kompetensi setara dengan laki-laki. Dalam konteks politik, Andrich dan Domahidi (2023) menemukan bahwa stereotip tersebut direproduksi secara diskursif melalui komunikasi publik di media sosial, di mana politisi perempuan lebih sering diasosiasikan dengan atribut personal, emosional, dan penampilan fisik dibandingkan dengan kapasitas kepemimpinan dan kompetensi politik. Sementara itu, Tremmel dan Wahl (2023) menunjukkan bahwa evaluasi terhadap pemimpin perempuan bersifat ambivalen, karena stereotip cenderung muncul kuat dalam penilaian eksplisit, namun melemah atau bahkan berbalik dalam penilaian implisit, yang mengindikasikan adanya *double bind* antara tuntutan agentic dan ekspektasi

komunal yang harus dinegosiasikan oleh perempuan dalam praktik kepemimpinan.

Di sisi lain, urgensi kajian ini muncul karena angka keterwakilan yang membanggakan tersebut masih dibayangi oleh kuatnya hambatan stereotip gender. Bila bias dan prasangka terhadap pemimpin perempuan dibiarkan, peningkatan keterwakilan perempuan berisiko menjadi pencapaian *kuantitatif* belaka tanpa diikuti perubahan kualitatif. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pada masa kampanye Pemilu/Pilkada 2024 narasi seksis dan diskriminatif terhadap perempuan masih marak digunakan untuk menyerang lawan politik Perempuan. Kondisi ini tidak saja merugikan kandidat perempuan secara individual, tetapi juga dapat mengikis kepercayaan publik terhadap kemampuan perempuan sebagai pemimpin (Sulistyo, 2021). Jika stereotip semacam itu tidak dikaji dan dilawan, dikhawatirkan akan muncul efek jera yang menghambat regenerasi perempuan pemimpin di masa depan. Oleh karena itu, penelitian tentang bagaimana stereotip gender dan budaya menghambat atau mempengaruhi kiprah pemimpin perempuan menjadi mendesak, terutama dalam konteks pasca-Pemilu 2024 ketika ekspektasi terhadap kinerja pemimpin perempuan semakin tinggi. Studi ini penting untuk memastikan bahwa kemajuan representasi perempuan benar-benar diimbangi dengan terciptanya iklim politik yang mendukung peran perempuan secara substantif, bebas dari stigma dan bias gender.

Selain itu, pandangan masyarakat terhadap pemimpin perempuan sering dibentuk oleh norma sosial dan

interpretasi agama yang bias (Shafira et al., 2024). Perempuan yang terjun ke ranah politik bukan hanya menghadapi prasangka gender atas peran mereka, melainkan juga stigma dari pemahaman keagamaan tertentu yang menganggap kepemimpinan adalah domain laki-laki. Akibatnya, perempuan harus berjuang ekstra keras membuktikan kapabilitasnya sambil menembus hambatan untuk mendapatkan peran yang setara dengan laki-laki. Stereotip dan bias terhadap pemimpin perempuan di politik Indonesia jelas masih menjadi isu yang relevan untuk dikaji. Oleh karena itu, masalah yang akan dibahas adalah bagaimana para pemimpin perempuan menantang stereotip gender dalam perspektif kultural serta dinamika terkini dari keterlibatan perempuan dalam politik Indonesia.

Penelitian stereotip gender dengan dinamika budaya lokal dan legitimasi kepemimpinan pada level eksekutif daerah masih terbatas. Dalam konteks Indonesia pasca-Pemilu 2024, meningkatnya keterwakilan perempuan secara kuantitatif belum diiringi dengan kajian mendalam mengenai pemimpin perempuan dalam mempertahankan legitimasi politiknya di tengah resistensi berbasis norma patriarki dan interpretasi agama yang bias gender. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kemajuan representasi formal dan realitas kultural yang dihadapi perempuan dalam kepemimpinan politik.

Kenyataan bahwa meskipun partisipasi politik perempuan di Indonesia terus mengalami peningkatan secara kuantitatif, pemimpin perempuan masih menghadapi berbagai bentuk stereotip gender dan hambatan kultural yang kuat. Pandangan bahwa

kepemimpinan adalah domain laki-laki yang diperkuat oleh norma sosial dan tafsir agama yang bias gender, menciptakan tantangan berlapis bagi perempuan dalam meraih dan menjalankan peran strategis di ranah politik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana stereotip gender dan konstruksi budaya memengaruhi penerimaan serta legitimasi pemimpin perempuan dalam politik Indonesia, serta bagaimana tokoh-tokoh perempuan kontemporer menanggapi dan menantang konstruksi tersebut melalui strategi representasi, komunikasi, dan kinerja politik.

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memperluas pemahaman akademik mengenai interaksi antara stereotip gender, budaya lokal, dan kepemimpinan politik dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia. Secara praktis, kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para pembuat kebijakan, organisasi masyarakat sipil, serta partai politik dalam merancang strategi yang lebih inklusif dan transformatif untuk mendukung keterlibatan perempuan dalam politik, tidak hanya secara simbolik, tetapi juga secara substantif. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan inspirasi dan referensi strategis bagi perempuan yang ingin terlibat lebih aktif dalam dunia politik, terutama dalam menghadapi dan meretas stereotip yang menghambat.

Dalam penelitian ini juga digunakan teori kesesuaian peran yang menyatakan bahwa prasangka terhadap pemimpin perempuan timbul akibat anggapan tidak selarasnya peran gender perempuan dengan peran kepemimpinan. Secara tradisional,

perempuan diasosiasikan dengan peran *communal* seperti sifat penyayang, lemah lembut, dan emosional sedangkan pemimpin diasosiasikan dengan sifat *agentic*, yaitu tegas, dominan, rasional. Akibat stereotip peran ini, perempuan yang berambisi atau menjabat sebagai pemimpin dianggap menyimpangi norma gender sehingga dipandang kurang legitimen dibanding laki-laki. Teori ini mengidentifikasi dua bentuk prasangka, yaitu prasangka penilaian yang menilai perempuan kurang cocok menduduki peran pemimpin dibanding laki-laki, dan prasangka evaluatif berupa tindakan kepemimpinan perempuan dinilai lebih keras atau negatif karena bertentangan dengan stereotip feminin. Teori kesesuaian peran (Role Congruity Theory) memprediksi perempuan akan menghadapi “*double bind*.” Jika ia berperilaku tegas layaknya pemimpin ideal, ia dikritik karena “tidak feminin”. Jika ia berperilaku sesuai stereotip feminin, ia dianggap tidak kompeten sebagai pemimpin. Teori ini relevan untuk menganalisis akar psikologis dari resistensi terhadap pemimpin perempuan di berbagai level politik.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komparatif strategi representasi dan komunikasi dua pemimpin perempuan Indonesia dengan latar kultural dan posisi sosial yang berbeda, yaitu Khofifah Indar Parawansa dan Sherly Tjoanda. Dengan menggunakan kerangka *role congruity theory*, penelitian ini tidak hanya mengkaji keberadaan stereotip gender, tetapi juga menempatkan pemimpin perempuan sebagai agen aktif yang menegosiasikan prasangka penilaian dan evaluatif melalui strategi simbolik, komunikatif, dan performatif dalam

konteks politik Indonesia yang kental dengan norma budaya dan religius. Pendekatan ini memperluas kajian stereotip kepemimpinan perempuan dari sekadar analisis persepsi menuju pemahaman tentang praktik resistensi dan transformasi makna kepemimpinan secara kontekstual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka dan studi kasus. Kajian pustaka dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis literatur ilmiah yang berkaitan dengan stereotip gender, perspektif budaya, dan kepemimpinan perempuan dalam politik. Literatur tersebut memberikan landasan teori mengenai hambatan-hambatan kultural dan struktural yang dihadapi perempuan dalam dunia politik, serta temuan-temuan empiris dari berbagai konteks, baik global maupun Indonesia. Kedua, dilakukan studi kasus terhadap dua tokoh pemimpin perempuan Indonesia, yaitu Khofifah Indar Parawansa dan Sherly Tjoanda. Pemilihan kedua studi kasus ini didasarkan pada pertimbangan signifikansi dan kontras konteks.

Khofifah Indar Parawansa merupakan politisi perempuan Muslim terkemuka yang berhasil menduduki jabatan Gubernur Jawa Timur dengan latar belakang budaya Islam yang kuat, sedangkan Sherly Tjoanda (Laos) merupakan sosok perempuan yang berhasil memenangkan pemilihan Gubernur Maluku Utara meskipun ia termasuk *“triple minority”* (perempuan, beragama Kristen di provinsi mayoritas Muslim, dan berlatar etnis Tionghoa). Data untuk masing-masing studi kasus diperoleh

dari sumber sekunder, antara lain pemberitaan media, dokumen profil singkat, serta konten yang dibagikan tokoh tersebut di media sosial.

Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan memadukan temuan literatur dengan fakta empiris pada kedua kasus. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk memahami bagaimana stereotip gender dan dinamika kultural beroperasi dalam kasus nyata, serta bagaimana faktor-faktor struktural, seperti jejaring politik dan modal sosial turut memengaruhi perjalanan dua pemimpin perempuan tersebut. Metode ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai tantangan yang dihadapi pemimpin perempuan serta strategi yang digunakan untuk menantang stereotip dalam ranah politik Indonesia.

HASIL PENELITIAN

Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, di tingkat provinsi hampir setengah dari seluruh provinsi di Indonesia diikuti oleh kandidat gubernur perempuan. Sementara itu, di tingkat kabupaten/kota, hampir setiap provinsi terdapat minimal satu perempuan yang maju sebagai calon kepala daerah. Fakta ini mencerminkan bahwa partisipasi perempuan dalam politik dan kepemimpinan publik telah meningkat pesat. Di tengah dinamika tersebut, muncul sejumlah sosok perempuan yang berhasil menantang stereotip gender dan membuktikan kemampuan mereka hingga mencapai posisi puncak kepemimpinan daerah. Sosok-sosok ini tidak hanya berhasil melawan stigma kultural yang menghalangi perempuan, tetapi juga

menginspirasi generasi berikutnya untuk berani melangkah ke dunia politik. Berikut ini akan dibahas dua contoh kasus pemimpin perempuan Indonesia yang dianggap mampu mendobrak hambatan-hambatan tersebut, beserta konteks kultural yang melingkupinya.

Studi Kasus: Khofifah Indar Parawansa

Khofifah Indar Parawansa adalah salah satu pemimpin perempuan paling prominen di Indonesia saat ini. Ia telah menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur (periode 2019–2024, dan terpilih kembali untuk periode berikutnya) dan dikenal luas sebagai tokoh Muslimat Nahdlatul Ulama. Pada awal pencalonannya sebagai gubernur, Khofifah menghadapi pro-kontra terkait pandangan sebagian ulama konservatif yang meragukan kebolehan perempuan menjadi pemimpin daerah. Namun demikian, gejolak stigmatisasi dari segelintir pemuka agama Islam tersebut tak menghalangi langkah Khofifah untuk maju dalam Pilkada Jawa Timur. Bahkan, Khofifah justru mendapat dukungan yang deras dari jaringan tokoh masyarakat dan ulama di Jawa Timur yang progresif dan mendukung keterlibatan perempuan (Sunaryo, 2021). Ini menunjukkan bahwa terdapat keragaman pandangan dalam komunitas agama; sebagian besar ulama di Jawa Timur nyatanya memberikan legitimasi dan dukungan bagi kepemimpinan Khofifah. Keberhasilan Khofifah menembus kontestasi Pilkada dengan kemenangan menunjukkan ia mampu menantang stereotip yang ada, dengan membuktikan bahwa seorang perempuan dapat menjadi politisi ulung

tanpa kehilangan identitas religiusnya. Ia tidak hanya piawai dalam berpolitik, tetapi juga aktif di berbagai organisasi Muslim, menunjukkan keseimbangan antara peran sebagai pemimpin publik dan sebagai sosok yang berakar pada komunitas agama.

Di samping kinerja dan aktivitas formalnya, Khofifah juga memanfaatkan media sosial untuk membangun citra dan komunikasi dengan publik. Melalui akun Instagram pribadinya, ia kerap membagikan ragam kegiatannya. Menariknya, selain didominasi foto-foto kegiatan resmi sebagai gubernur dan aktivis Muslimat NU, sesekali Khofifah menyisipkan unggahan yang bersifat *personal* dan *“apa adanya”*. Sebagai contoh, ia pernah mengunggah foto cucunya yang tengah memeluk buah alpukat hasil panen, membagikan momen ketika bunga tulip yang ia tanam pertama kali berbunga (bahkan ia tak segan meminta tips merawat tulip kepada para pengikutnya), hingga berfoto bersama kucing peliharaannya. Unggahan-unggahan berkesan humanis ini memperlihatkan sisi lain Khofifah yang hangat dan membumi sebagai seorang nenek dan pecinta hewan sehingga mampu mendekatkan dirinya dengan rakyat dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik.

Selain menampilkan sisi *personal*, Khofifah tetap konsisten menunjukkan jati diri religiusnya baik di dunia nyata maupun media sosial. Ia kerap membagikan refleksi spiritual, kutipan doa, serta pesan-pesan islami di akun Instagram-nya, yang semuanya memperkuat citranya sebagai pemimpin yang tidak hanya kompeten secara politik tetapi juga teguh pada prinsip agama. Upaya ini selaras

dengan kebutuhan untuk meyakinkan konstituen bahwa dirinya tetap memenuhi norma-norma religius sekaligus mampu menjalankan tugas pemerintahan dengan baik. Dapat dikatakan, Khofifah menggunakan media sosial sebagai ruang untuk menampilkan kompleksitas peran yang dijalani. Di satu sisi sebagai pemimpin daerah perempuan yang berada dalam sorotan (menghadapi tantangan representasi terkait gender dan agama), namun di sisi lain ia mampu membuktikan bahwa identitasnya sebagai perempuan Muslimah tidak menghalangi kapasitasnya memimpin. Hal ini sejalan dengan analisis Tarlo & Moors (dalam Peterson, 2017) yang mencatat bahwa perempuan Muslim sering menghadapi stereotip ganda dalam representasi publik mereka. Khofifah berhasil meredam stereotip negatif terhadap perempuan Muslim di politik dengan menunjukkan bahwa ia dapat menjadi pemimpin efektif tanpa melepaskan identitas keagamaannya. Keberhasilan strategi representasi ganda Khofifah ini menjadikannya role model penting bagi politisi perempuan lain yang berlatar belakang serupa.

Dalam konteks prasangka penilaian, Khofifah berhasil membuktikan bahwa perempuan bisa memiliki kualitas *agentic* yang dibutuhkan dalam kepemimpinan politik. Kinerjanya dalam penanganan pandemi COVID-19 dan program pemberdayaan masyarakat menunjukkan kapasitas strategis dan ketegasan yang sering kali diragukan publik terhadap pemimpin perempuan. Sementara dalam konteks prasangka evaluatif, Khofifah mengelola persepsi publik melalui komunikasi simbolik: ia tetap tampil hangat, religius, dan

familier tanpa kehilangan otoritasnya sebagai gubernur. Dengan demikian, ia mereduksi resistensi publik terhadap gaya kepemimpinan perempuan yang dominan dengan menyelaraskannya dalam narasi gender yang dapat diterima.

Studi Kasus: Sherly Tjoanda

Sherly Tjoanda Laos merupakan contoh pemimpin perempuan lain yang mampu menembus berbagai hambatan stereotip di ranah politik lokal. Sherly mencuat dalam kancah politik Provinsi Maluku Utara pada Pilkada 2024 melalui jalan yang tidak konvensional yaitu menggantikan posisi mendiang suaminya, Benny Laos, yang wafat akibat kecelakaan perahu cepat saat sedang mengikuti kampanye. Sebelumnya, Sherly tidak dikenal sebagai politisi karier; perannya lebih banyak sebagai istri Bupati Pulau Morotai (Benny Laos) dan aktivis sosial. Namun setelah kepergian suaminya, Sherly memutuskan maju sebagai calon Gubernur Maluku Utara untuk melanjutkan visi yang telah dirintis oleh almarhum. Langkah Sherly ini menghadapkan dirinya pada tantangan stereotip yang berlapis. Berbeda dengan Khofifah yang menghadapi isu gender dan agama dalam kultur mayoritas Muslim Jawa, Sherly menghadapi tambahan tantangan karena identitasnya sebagai bagian dari kelompok minoritas di daerah pilihannya. Ia adalah seorang perempuan beragama Kristen Protestan di tengah masyarakat Maluku Utara yang mayoritas Muslim, sekaligus merupakan warga keturunan Tionghoa yang tergolong minoritas etnis di sana. Meskipun demikian, figur Sherly mampu menentang stereotip tidak

hanya sebagai perempuan, tetapi juga sebagai penganut agama minoritas dalam politik lokal provinsinya (Mulawarman et al., 2025).

Sebelum terjun langsung sebagai kandidat, Sherly telah membangun *modal sosial* yang penting melalui peran-peran informalnya. Di masyarakat Maluku Utara, ia dikenal aktif mendampingi suaminya ketika menjabat bupati, dan sering turun ke lapangan (blusukan) bertemu warga. Sherly juga terlibat dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan dan memimpin sejumlah organisasi lokal di provinsi tersebut. Tak jarang, ia membagikan aktivitas kesehariannya sebagai istri kepala daerah dan ibu dari tiga anak melalui media sosial. Jejak rekam ini membantu Sherly memperoleh visibilitas publik dan simpati masyarakat bahkan sebelum ia mencalonkan diri secara resmi. Dengan demikian, meski Sherly bukan kader partai politik sejak awal, ia bukan sosok yang asing bagi pemilih Maluku Utara – faktor yang cukup krusial dalam kontestasi elektoral lokal.

Hasilnya, Sherly Tjoanda berhasil terpilih sebagai Gubernur Maluku Utara periode 2025–2030, menjadikannya gubernur perempuan pertama dalam sejarah provinsi tersebut. Kemenangannya diraih dengan perolehan suara tertinggi, mengungguli para kandidat laki-laki pesaingnya. Yang paling menarik dari kasus Sherly adalah bagaimana latar belakangnya sebagai *triple minority* tidak menghalanginya untuk memenangkan hati pemilih. Kemenangan Sherly menantang asumsi lazim bahwa calon pemimpin yang berbeda dari mayoritas (baik dari segi gender, agama, maupun etnis) akan

sulit diterima. Keberhasilannya memberikan preseden bahwa pemilih di daerah tertentu dapat bersikap terbuka terhadap figur pemimpin perempuan yang kompeten meskipun berasal dari latar minoritas ganda (Mulawarman et al., 2025). Tentu perlu diakui, kemenangan Sherly juga didukung oleh faktor *political endowment* seperti jejaring dan simpati politik yang sebelumnya dimiliki almarhum suaminya. Namun demikian, pencapaian Sherly tetap menegaskan bahwa kapabilitas dan kedekatan dengan masyarakat dapat mengatasi bias-bias stereotip dalam politik lokal. Bagi perempuan di Maluku Utara dan Indonesia pada umumnya, figur Sherly membawa pesan bahwa dengan kombinasi kerja nyata di tengah masyarakat dan keberanian tampil, hambatan struktural maupun kultural dapat diatasi.

Prasangka penilaian terhadap Sherly terlihat dalam persepsi publik yang meragukan kemampuannya sebagai perempuan minoritas dalam konteks mayoritas Muslim. Namun ia menanggapi hal ini dengan membangun rekam jejak di bidang sosial dan kesehatan, serta memperkuat koneksi dengan komunitas lokal. Sementara itu, prasangka evaluatif muncul ketika ia mulai tampil sebagai pemimpin dengan keputusan tegas dan berani karena beberapa pihak menilainya sebagai terlalu agresif. Sherly merespons dengan tetap konsisten menunjukkan komitmen pada nilai-nilai sosial dan pelayanan publik, sambil memperkuat narasi bahwa kepemimpinan berbasis kepedulian adalah bentuk kekuatan, bukan kelemahan.

Dengan demikian, baik Khofifah maupun Sherly secara aktif

menegosiasikan dua bentuk prasangka dalam teori kesesuaian peran melalui strategi simbolik, komunikatif, dan performatif. Mereka tidak hanya menyesuaikan diri terhadap norma yang ada, tetapi juga mendefinisikan ulang apa yang dimaksud dengan kepemimpinan perempuan dalam politik Indonesia. Hal ini dapat memperluas ruang interpretasi peran gender tanpa kehilangan otoritas maupun autentisitas mereka sebagai pemimpin.

PEMBAHASAN

Stereotip Gender dalam Kepemimpinan Politik

Menurut kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR), stereotip gender didefinisikan sebagai pandangan umum atau prakonsepsi yang digeneralisasi tentang atribut, karakteristik, atau peran yang seharusnya dimiliki atau dilakukan oleh perempuan dan laki-laki (Tabassum, 2021). Dalam konteks kepemimpinan politik, stereotip ini sering merugikan perempuan, karena mempertanyakan kemampuan mereka sebagai pemimpin sejak awal. Salah satu contoh stereotip yang umum adalah anggapan bahwa perempuan lebih emosional daripada laki-laki yang dianggap membuat mereka kurang rasional dalam memimpin. Kepercayaan bahwa perempuan lebih emosional memang merupakan salah satu stereotip gender yang paling mengakar kuat di banyak budaya (Nenabu, 2025). Stereotip ini, meskipun tampak sederhana, cukup mengkhawatirkan karena menghadirkan hambatan bagi perempuan untuk mencapai dan berhasil dalam peran kepemimpinan.

Dengan kata lain, label “terlalu emosional” dapat digunakan untuk meragukan kapasitas perempuan mengambil keputusan penting sehingga menghambat kenaikan mereka ke posisi puncak.

Penelitian-penelitian lintas negara menunjukkan pola prasangka yang serupa terhadap pemimpin perempuan. Terdapat kecenderungan sikap publik yang kurang positif terhadap pemimpin atau calon pemimpin perempuan dibandingkan laki-laki. Triana et al. (2024) mengajukan *role congruity theory* untuk menjelaskan fenomena ini. Intinya, mereka menemukan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara stereotip peran gender feminin dengan karakteristik yang diharapkan dari seorang pemimpin sehingga perempuan dianggap “tidak cocok” dengan prototipe pemimpin ideal. Ketidaksesuaian ini berujung pada prasangka bahwa perempuan kurang layak memimpin semata-mata karena jenis kelaminnya, terlepas dari kualifikasi pribadinya. Akibatnya, perempuan harus menghadapi hambatan lebih besar untuk diakui dan sukses dalam posisi kepemimpinan dibanding laki-laki dengan kualifikasi setara.

Senada dengan itu, Mendoza & DiMaria (2019) mengungkapkan bahwa dalam kontestasi politik, ambisi untuk berkuasa dipandang melanggar sifat-sifat stereotip feminin yang diharapkan dari perempuan. Keinginan “ingin berkuasa” dianggap tidak pantas bagi perempuan karena bertentangan dengan stereotip bahwa perempuan seharusnya lemah lembut, tidak agresif, dan tidak dominan. Imbasnya, politisi perempuan kerap tidak mendapat

pertimbangan atau dukungan yang sama seperti politisi laki-laki, sekalipun kemampuan dan pengalamannya setara atau lebih unggul. Perempuan yang mencalonkan diri pada jabatan politik memiliki kemungkinan dukungan elektoral lebih kecil dibanding laki-laki karena pemilih (dan bahkan elit partai) merasa ada ketidakcocokan prototipikal antara jenis kelamin perempuan dan peran pemimpin (Mariyanti et al., 2024). Bias bawah sadar ini berarti, bagi sebagian orang, “pemimpin ideal” masih melekat pada figur laki-laki sehingga calon perempuan harus bekerja lebih keras untuk meyakinkan bahwa dirinya memenuhi ekspektasi pemimpin ideal tersebut.

Penelitian lain oleh Kerevel & Atkeson (2015) menemukan bahwa stereotip gender tentang kepemimpinan sangat berpengaruh terutama dalam situasi ketika informasi tentang kandidat terbatas. Dalam kondisi *low-information*, pemilih maupun elite cenderung menggunakan stereotip sebagai heuristik (cara pintas) untuk mengambil keputusan. Hal ini merugikan perempuan karena stereotip yang bias gender dapat langsung menempatkan kandidat perempuan pada posisi kurang menguntungkan sebelum mereka dinilai berdasarkan merit yang sesungguhnya. Dalam mengubah pandangan stereotip semacam ini, diperlukan lebih banyak perempuan yang menduduki posisi eksekutif publik agar masyarakat terbiasa melihat perempuan sebagai pemimpin dan panutan. Semakin sering publik menyaksikan keberhasilan perempuan memimpin, diharapkan stereotip negatif akan terkikis karena *role model* perempuan yang kompeten

kian hadir di ruang publik (Paule & Yelin, 2022).

Dari sisi psikologis, Gaus et al. (2023) menyoroti bagaimana stereotip mengenai emosi berdampak pada penilaian bias terhadap pemimpin perempuan. Hanya karena laki-laki cenderung kurang mengekspresikan emosi secara terbuka dibanding perempuan, banyak yang salah mengartikan bahwa emosi hampir tidak memengaruhi keputusan atau perilaku laki-laki. Sebaliknya, perempuan yang mengekspresikan emosi dianggap “tidak stabil” dan kurang mampu bersikap objektif. Akibat stereotip ini, perempuan sering dinilai kurang rasional, kurang mampu menerima kritik, dan kurang tegas dalam memimpin dibanding laki-laki. Tentu saja pandangan stereotipikal ini tidak adil dan tidak akurat, namun sayangnya dapat melemahkan persepsi tentang kompetensi pemimpin perempuan secara signifikan. Stereotip bahwa perempuan itu terlalu emosional atau kurang rasional dapat menjadi *self-fulfilling prophecy* yang menghambat karier politik perempuan, karena mereka mungkin diberikan standar penilaian yang lebih keras atau skeptisisme yang lebih tinggi dari publik dan kolega kerja (Aday et al., 2025).

Perspektif Kultural terhadap Pemimpin Perempuan

Selain bias gender secara umum, hambatan bagi pemimpin perempuan juga datang dari konstruksi budaya dan interpretasi agama yang patriarkal (Koburtay et al., 2023; Öztürk, 2022). Budaya patriarki yang mengakar kuat di masyarakat cenderung menolak kehadiran perempuan di panggung

kepemimpinan politik. Sistem nilai patriarkal ini melegitimasi anggapan bahwa peran laki-laki sebagai pemimpin lebih utama daripada perempuan. Ironisnya, masih banyak perempuan yang turut menyetujui pandangan tersebut dan menerima dominasi laki-laki sebagai sesuatu yang alami. Lebih jauh lagi, tafsir agama yang konservatif kerap digunakan untuk membatasi ruang gerak perempuan dalam politik. Sebagian pandangan keagamaan tertentu menegaskan bahwa perempuan sebaiknya tidak memimpin, seolah-olah jabatan tertinggi adalah hak prerogatif laki-laki semata (Suradiredja, 2019). Kombinasi antara norma budaya dan doktrin religius ini menciptakan hambatan ganda bagi perempuan: selain harus melawan stereotip gender, mereka juga harus menghadapi sentimen bahwa keberadaan mereka di pucuk pimpinan bertentangan dengan “kodrat” atau ajaran agama.

Stigma bahwa “perempuan tidak cocok menjadi pemimpin” hingga kini masih menjadi opini yang langgeng di masyarakat. Keyakinan ini sulit diubah karena sering dikaitkan dengan legitimasi teks agama yang diinterpretasikan secara harfiah tanpa konteks yang tepat. Misalnya, dalam komunitas Muslim konservatif, ayat Al-Qur’an “*arrijalu qawwamuna ‘ala an-nisa*” yang umum dipahami sebagai “laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan” (QS An-Nisa: 34) sering dijadikan justifikasi teologis untuk menolak kepemimpinan perempuan di ranah publik. Akibatnya, perempuan yang berambisi jadi pemimpin kerap ditentang bukan semata karena kompetensinya diragukan, tapi karena dianggap melanggar norma agama.

Bahkan, jika menilik media daring, pencarian kata kunci “pemimpin perempuan” di *YouTube* didominasi oleh ceramah tokoh agama mengenai hukum perempuan menjadi pemimpin. Dominasi narasi seperti ini mempertegas bahwa perdebatan tentang pemimpin perempuan di Indonesia hampir selalu dikaitkan dengan kerangka kultural-religius (Oktaviani, 2024). Perempuan dalam politik berada di posisi di mana mereka harus membuktikan dua hal sekaligus: bahwa mereka kompeten secara profesional, dan bahwa kiprah mereka tidak melanggar nilai-nilai budaya atau ajaran agama.

Keterlibatan perempuan dalam politik Indonesia telah mengalami kemajuan berarti, tetapi tantangan yang mereka hadapi masih kompleks. Temuan kajian ini menegaskan bahwa meskipun partisipasi perempuan kian meningkat, hambatan berupa stereotip gender dan bias kultural-religius tetap menjadi aral utama. Perempuan yang terjun ke politik sering kali harus bekerja lebih keras untuk membuktikan kapasitasnya di tengah ekspektasi masyarakat yang masih bias gender (Li, 2024). Dari pembahasan di atas, dapat dilihat bahwa beberapa pemimpin perempuan mampu muncul sebagai pengecualian yang menantang stereotip dan stigma, membuktikan bahwa perempuan bisa memimpin dengan baik. Mereka menjadi bukti keberhasilan perempuan melawan hambatan budaya dan menjadi inspirasi bagi kaumnya. Secara umum jalan menuju kepemimpinan bagi perempuan masih penuh rintangan sehingga dukungan dan perubahan struktural diperlukan agar capaian-capaian

individu ini dapat berkembang menjadi fenomena yang lebih luas.

Di samping hambatan kultural, perlu disoroti pula tantangan struktural yang dihadapi perempuan dalam meraih jabatan politik (Yuliana, 2025). Selama ini kajian tentang pemimpin perempuan banyak berfokus pada aspek stereotip dan budaya, sementara aspek struktural kurang mendapat perhatian. Padahal, kendala struktural seperti akses terhadap modal politik, mahal biaya kampanye, serta terbatasnya jaringan dukungan merupakan faktor signifikan yang membedakan peluang perempuan dan laki-laki dalam kontestasi politik. Sistem politik Indonesia yang kompetitif dan berbiaya tinggi menuntut kandidat memiliki sumber daya besar (baik finansial maupun sosial) untuk dapat bersaing. Konsekuensinya, perempuan tanpa dukungan dana dan jaringan kuat seringkali gugur sebelum bertanding, terlepas dari kapasitas individunya. Dengan kata lain, tantangan bagi perempuan bukan hanya melawan stereotip kultural, tetapi juga menaklukkan hambatan struktural yang tidak kalah berat.

Fenomena Pilkada 2024 memperlihatkan indikasi bahwa perempuan yang berhasil memenangkan pemilihan kepala daerah umumnya memiliki afiliasi dengan dinasti politik atau hubungan kekerabatan dengan tokoh politik terkemuka. Sherly Tjoanda, misalnya, masuk ke gelanggang politik melalui jalur melanjutkan pengaruh suaminya. Pola ini menunjukkan terpilihnya perempuan sering kali masih sangat dipengaruhi oleh jaringan kekuasaan yang sudah mapan. Artinya, struktur politik saat ini lebih membuka ruang

bagi perempuan yang berada di lingkaran elite atau keluarga politik, sementara perempuan di luar itu menghadapi perjuangan tambahan untuk diakui. Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah bagi agenda kesetaraan politik, yaitu bagaimana membuka akses dan peluang yang lebih luas bagi perempuan dari berbagai latar belakang untuk ikut bersaing secara *fair* di arena politik.

Ke depan, upaya mendorong lebih banyak pemimpin perempuan perlu menyasar dua ranah utama, yaitu kultural dan struktural. Dari sisi kultural, pendidikan publik dan kampanye tentang kesetaraan gender harus terus digalakkan untuk mengikis stereotip negatif terhadap kepemimpinan perempuan. Dukungan dari tokoh masyarakat, termasuk pemuka agama yang progresif, juga penting untuk mengubah narasi bahwa perempuan boleh dan mampu menjadi pemimpin. Sementara itu dari sisi struktural, perlu diadakan kebijakan dan inisiatif yang membantu perempuan mengatasi hambatan praktis dalam politik, misalnya program pelatihan kepemimpinan, skema pendanaan kampanye yang adil, pembentukan *mentoring* dan jaringan solidaritas antar-perempuan politisi, serta penegakan regulasi kuota gender secara lebih efektif. Penelitian lanjutan sebaiknya turut mengeksplorasi strategi-strategi apa saja yang digunakan perempuan dalam menantang stereotip gender di arena politik, serta bagaimana kebijakan afirmatif dapat diimplementasikan optimal untuk menghadirkan kondisi persaingan politik yang lebih setara. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan ke depannya semakin

banyak perempuan yang mampu muncul sebagai pemimpin tanpa dibayangi stigma ataupun hambatan struktural. Pada akhirnya, hadirnya lebih banyak perempuan di posisi strategis akan mengubah lanskap politik Indonesia menjadi lebih inklusif dan berperspektif gender demi terwujudnya demokrasi yang adil bagi semua.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa stereotip gender dan konstruksi budaya secara signifikan memengaruhi penerimaan serta legitimasi pemimpin perempuan dalam politik Indonesia, meskipun keterwakilan perempuan menunjukkan peningkatan secara kuantitatif. Dengan menggunakan kerangka *role congruity theory*, penelitian ini menemukan bahwa pemimpin perempuan masih menghadapi dua bentuk utama prasangka, yaitu prasangka penilaian yang meragukan kecocokan perempuan dengan peran kepemimpinan, serta prasangka evaluatif yang menilai perilaku tegas perempuan secara negatif karena dianggap menyimpang dari norma feminin.

Studi kasus terhadap Khofifah Indar Parawansa dan Sherly Tjoanda menunjukkan bahwa pemimpin perempuan tidak bersifat pasif dalam menghadapi stereotip tersebut. Keduanya secara aktif menantang dan menegosiasikan prasangka gender melalui strategi representasi yang bersifat komunikatif, simbolik, dan performatif, yang disesuaikan dengan konteks budaya dan sosial masing-masing. Khofifah memperkuat legitimasi kepemimpinannya dengan mengintegrasikan identitas religius dan

gaya kepemimpinan agentic, sementara Sherly membangun penerimaan publik melalui kedekatan sosial dan konsistensi kinerja di tengah posisinya sebagai kelompok minoritas berlapis.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa legitimasi pemimpin perempuan tidak semata ditentukan oleh jumlah keterwakilan, tetapi oleh kemampuan mereka dalam menavigasi stereotip gender dan hambatan kultural secara strategis. Kehadiran pemimpin perempuan yang mampu melakukan negosiasi tersebut berpotensi mendorong kepemimpinan politik yang lebih inklusif dan substantif di Indonesia, sekaligus membuka ruang transformasi terhadap makna kepemimpinan yang selama ini didominasi oleh norma maskulin.

DAFTAR PUSTAKA

- Aday, A., Engstrom, H. R., & Schmader, T. (2025). Gender Essentialism Leads to Biased Learning Opportunities That Shape Women's Career Interests. *Psychological Science*, 36(8), 622–636.
<https://doi.org/10.1177/09567976251353753>
- Andrich, A., & Domahidi, E. (2023). A Leader and a Lady? A Computational Approach to Detection of Political Gender Stereotypes in Facebook User Comments. *International Journal of Communication*, 17, 236–255.
<https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/19041>
- Anzia, S. F., & Bernhard, R. (2022). Gender Stereotyping and the Electoral Success of Women

- Candidates: New Evidence from Local Elections in the United States. *British Journal of Political Science*, 52(4), 1544–1563. <https://doi.org/10.1017/S0007123421000570>
- Brescoll, V. L. (2016). Leading with their hearts? How gender stereotypes of emotion lead to biased evaluations of female leaders. *The Leadership Quarterly*, 27(3), 415–428. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2016.02.005>
- del Carmen Triana, M., Song, R., Um, C. T., & Huang, L. (2024). Stereotypical Perception in Management: A Review and Expansion of Role Congruity Theory. *Journal of Management*, 50(1), 188–215. <https://doi.org/10.1177/01492063231180836>
- Faisal, M., Fachyuzar, M. Z., Lumbangaol, P., & Sihombing, A. (2024). 2 Dekade Affirmative Action Keterwakilan Perempuan dalam Politik Indonesia. *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum*, 3(1), 55–60. <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v3i1.628>
- Gaus, N., Larada, N., Jamaluddin, S., Paramma, M. A., & Karim, A. (2023). Understanding the emergence of females as leaders in academia: The intersections of gender stereotypes, status and emotion. *Higher Education Quarterly*, 77(4), 693–708. <https://doi.org/10.1111/hequ.12426>
- Givon, E., Berkovich, R., Oz-Cohen, E., Rubinstein, K., Singer-Landau, E., Udelsman-Danieli, G., & Meiran, N. (2023). Are women truly “more emotional” than men? Sex differences in an indirect model-based measure of emotional feelings. *Current Psychology*, 42(36), 32469–32482. <https://doi.org/10.1007/s12144-022-04227-z>
- Heilman, M. E., Caleo, S., & Manzi, F. (2024). Women at Work: Pathways from Gender Stereotypes to Gender Bias and Discrimination. *Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior*, 11, 165–192. <https://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-110721-034105>
- Kerevel, Y. P., & Atkeson, L. R. (2015). Reducing Stereotypes of Female Political Leaders in Mexico. *Political Research Quarterly*, 68(4), 732–744. <https://doi.org/10.1177/1065912915607637>
- Koburtay, T., Abuhussein, T., & Sidani, Y. M. (2023). Women Leadership, Culture, and Islam: Female Voices from Jordan. *Journal of Business Ethics*, 183(2), 347–363. <https://doi.org/10.1007/s10551-022-05041-0>
- Komnas Perempuan. (7, November 2024). Pernyataan Sikap Komnas Perempuan tentang Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024. Diakses dari: <https://komnasperempuan.go.id/pe-nyataan-sikap-detail/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-tentang-pemilihan-kepala-daerah-serentak-2024>
- Li, Y. (2024). Systemic and Sociocultural Factors Impeding

- Women's Political Participation and Leadership Development: A Sociological Inquiry. *SHS Web of Conferences*, 187, 03016. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202418703016>
- Mandasari, N. (2023). Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender. *Ebisma (Economics, Business, Management, & Accounting Journal)*, 3(2), 133–143. <https://doi.org/10.61083/ebisma.v3i2.38>
- Mariyanti, E., Sari, P. E., & Putri, S. L. (2024). Analisis Persepsi Pemilih Terhadap Penampilan Calon Dan Dampaknya Terhadap Pemilihan Calon Perempuan Dalam Pemilu 2024. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 26(1), 216–234. <https://doi.org/10.47233/jebd.v26i1.1317>
- Mendoza, S. A., & DiMaria, M. G. (2019). Not “With Her”: How Gendered Political Slogans Affect Conservative Women's Perceptions of Female Leaders. *Sex Roles*, 80(1–2), 1–10. <https://doi.org/10.1007/s11199-018-0910-z>
- Mulawarman, Saputra, I., Banggu, M., Tusriadi, & Amalia, D. R. (2025). Kemenangan Pasangan Sherly Tjoanda dan Sarbin Sahe Sebagai Representasi Kelompok Minoritas pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara 2024. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(1), 323–342. <https://doi.org/10.33506/jn.v11i1.4467>
- Nenabu, F. M. (2025). Women and Gender Stereotypes: A New Paradigm Toward Equality Okky Mandasari's Entrok Novel. *Formosa Journal of Sustainable Research*, 4(6), 1095–1106. <https://doi.org/10.55927/fjsr.v4i6.365>
- Oktaviani, F. H. (2024). Indonesian women leaders navigating hegemonic femininity: A Gramscian lens. *Gender, Work & Organization*, 31(2), 472–493. <https://doi.org/10.1111/gwao.13084>
- Öztürk, C. (2022). Revisiting the islam-patriarchy nexus: is religious fundamentalism the central cultural barrier to gender equality? *Zeitschrift Für Religion, Gesellschaft Und Politik*, 7(1), 173–206. <https://doi.org/10.1007/s41682-022-00130-3>
- Paule, M., & Yelin, H. (2022). ‘I don't want to be known for it’: Girls, leadership role models and the problem of representation. *European Journal of Cultural Studies*, 25(1), 238–255. <https://doi.org/10.1177/13675494211004595>
- Peterson, K. M. (2017). *Islamic Fashion Images on Instagram and the Visuality of Muslim Women*. In *Race and Gender in Electronic Media: Content, Context, Culture*. Routledge
- Shafira, S., Maryam, M., & Kurniati, K. (2024). Tantangan dan Peluang Kepemimpinan Perempuan dalam Masyarakat Perspektif Hukum Islam. *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 85–94.

- <https://doi.org/10.52029/pjhki.v2i2.228>
- Sulistyo, A. (2021). *Soradem: Solo Ramah Demokrasi, Potret Demokrasi Kota*. Pandiva Buku. Yogyakarta
- Sunaryo, Y. A., & Jatiningsih, O. (2021). Pandangan Intelektual Terhadap Wacana Kyai Pendukung Khofifah Indar Parawansa Dalam Kontestasi Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 9(3), 610–625. <https://doi.org/10.26740/kmkn.v9n3.p610-625>
- Suradiredja, D. Y., & Jpang, S. (2019). *Perempuan di Singgasana Lelaki: Atlas Pemimpin Perempuan Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Tabassum, N., & Nayak, B. S. (2021). Gender Stereotypes and Their Impact on Women's Career Progressions from a Managerial Perspective. *IIM Kozhikode Society & Management Review*, 10(2), 192–208. <https://doi.org/10.1177/2277975220975513>
- Tremmel, M., & Wahl, I. (2023). Gender stereotypes in leadership: Analyzing the content and evaluation of stereotypes about typical, male, and female leaders. *Frontiers in Psychology*, 14(January). <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1034258>
- Uzma, H. N. (2024). Keterwakilan Perempuan di DPR Cetak Rekor, Puan: Mari Jadi Srikandi Rakyat. DetikNews. <https://news.detik.com/berita/d-7595028/keterwakilan-perempuan-di-dpr-cetak-rekor-puan-mari-jadi-srikandi-rakyat>
- Yuliana, R. A., & Hermawati, I. (2025). Evolusi Representasi Politik Perempuan Di Tingkat Lokal Indonesia: Tantangan Dan Peluang. *Social: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(2), 601–609. <https://doi.org/10.51878/social.v5i2.5733>